

**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
(AUDITED)**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



Drh. Rachmi Setyorini, MKM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	61

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23, JAKARTA PUSAT 10560
TELEPON 021 4244819, 4207683, 4244691 FAXIMILE 021 4244819**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



Drh. Rachmi Setyorini, MKM

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp115.523.805.999,00 atau mencapai 118 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp97.960.620.000,00. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp43.845.541.410,00 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 43.854.522.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.745.983.522,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp52.630.700,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.855.004.370,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp838.348.452,00, Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.254.362.500,00 dan (Rp3.508.378.978,00).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp113.641.525.000,00. Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp44.147.520.884,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp69.494.004.116,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp24.203.999,00 dan sebesar Rp69.518.208.115,00. sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp69.518.208.115,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp6.098.817.612,00 dikurangi Surplus-LO sebesar Rp69.518.208.115,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp7.464.637.500,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp71.660.767.205,00) serta penurunan ekuitas sebesar Rp9.607.196.590,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai (Rp3.508.378.978,00)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**Tabel 1. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022			% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Di Bawah)		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	97.960.620.000	115.523.805.999	17.563.185.999	117,93	40.175.835
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		97.960.620.000	115.523.805.999	17.563.185.999	117,93	40.175.835
BELANJA	B.2.					
Belanja Barang	B.3	41.698.835.000	41.689.857.509	(8.977.491)	99,98	32.260.971.876
Belanja Modal	B.4	2.155.687.000	2.155.683.901	(3.099)	100,00	2.096.695.013
JUMLAH BELANJA		43.854.522.000	43.845.541.410	(8.980.590)	99,98	34.357.666.889

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**Tabel 2. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Persediaan	C.1.1	52.630.700	10.025.000
Jumlah Aset Lancar		52.630.700	10.025.000
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	13.943.165.425	14.907.256.361
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2	-	32.450.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.3	302.765.200	425.198.150
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.4	(9.390.926.255)	(9.660.563.440)
Jumlah Aset Tetap		4.855.004.370	5.704.341.071
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	2.181.715.400	2.065.638.500
Aset Lain-Lain	C.3.2	1.704.152.234	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(3.047.519.182)	(1.681.186.959)
Jumlah Aset Lainnya		838.348.452	384.451.541
JUMLAH ASET		5.745.983.522	6.098.817.612
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.1	9.254.362.500	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.254.362.500	
JUMLAH KEWAJIBAN		9.254.362.500	
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	(3.508.378.978)	6.098.817.612
JUMLAH EKUITAS		(3.508.378.978)	6.098.817.612
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.745.983.522	6.098.817.612

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

Tabel 3. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	113.641.525.000	-
JUMLAH PENDAPATAN		113.641.525.000	-
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	97.918.300	206.113.909
Beban Barang dan Jasa	D.3	17.437.027.401	15.430.614.726
Beban Pemeliharaan	D.4	33.858.449	57.652.092
Beban Perjalanan Dinas	D.5	24.078.447.659	16.585.345.158
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	2.500.269.075	1.959.162.536
JUMLAH BEBAN		44.147.520.884	34.238.888.421
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		69.494.004.116	(34.238.888.421)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		47.555.999	35.555.555
Beban Pelepasan Aset Nonlancar		23.352.000	150.749.836
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		24.203.999	(115.194.281)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		-	4.620.280
Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan non Operasional Lainnya	D.7	-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		24.203.999	(110.574.001)
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		69.518.208.115	(34.349.462.422)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**Tabel 4. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	6.098.817.612	4.548.131.244
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	69.518.208.115	(34.349.462.422)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
	E.4		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2		-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3		-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	(45.000.000)	(198.000)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	(7.419.637.500)	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(7.464.637.500)	(198.000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(71.660.767.205)	35.900.346.790
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(9.607.196.590)	1.550.686.368
EKUITAS AKHIR	E.6	(3.508.378.978)	6.098.817.612

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

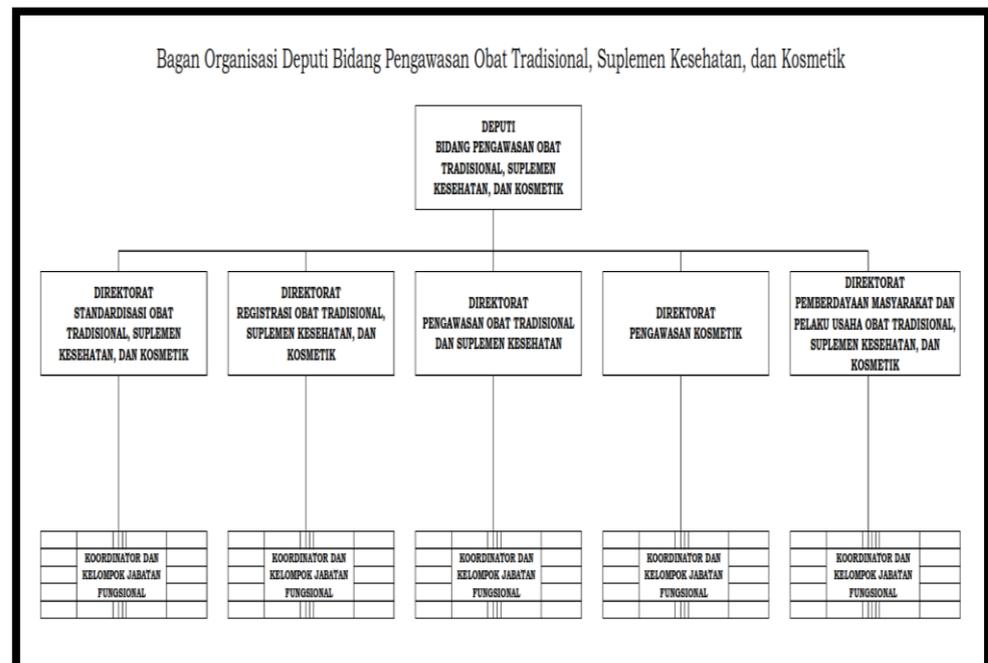
Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Deputy II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

- Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Direktorat Pengawasan Kosmetik
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

A.1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Renstra diisi nama satker memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan

pembangunan sesuai tugas dan fungsi diisi nama satker untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi diisi nama satker Tahun 2019-2024

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Misi diisi nama satker sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan untuk periode tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengajui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Deputi

Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan POM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

Pengakuan pendapatan berdasarkan kas yang diterima adalah pendapatan diakui pada saat penerimaan kas, yang berlaku pada Satker Deputy II antara lain :

- Pada layanan jasa penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE)
- Penerbitan Nomor Izin Edar dan Notifikasi, Persetujuan Iklan, dan Penerbitan persetujuan uji klinik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik dan Cara Pembuatan Kosmetik yang baik
- Penerbitan Persetujuan Denah Kosmetik
- Penerbitan rekomendasi Fasilitas bersama

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul

hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria kualitas piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

- Persediaan merupakan asset yang berupa :
 1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
 - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
 - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
 2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.

4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Perka Badan POM No. 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sample). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian
 - b. Biaya pengangkutan
 - c. Biaya penanganan
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
 2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a. Potongan harga
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
 - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi

sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.

3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.
- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
 - a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorim yang belum digunakan.
 - 3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan. dan masih dalam keadaan baik.
 - b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas KMK Nomor 620/KM.6/2021 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.
- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas,

disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Alokasi dan Realisasi
Anggaran serta
Capaian Output

A.6 Capaian Output Strategis

Selama periode Tahun Anggaran 2022, output strategis yang telah dicapai oleh satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut :

Table 8. Capaian Output

Kode Output Strategis	Uraian RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan %	Target Keluaran	Satuan	Realisasi Vol.Keluaran
4121 BIA001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	4.789.152.000	4.789.151.459	100	1386	Keputusan	100
4129 CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1.426.956.000	1.426.955.050	100	100	Unit	100
6385 BDC002	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	5.404.555.000	5.428.927.406	100,45	163	kegiatan	100
4121 BAH001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	3.351.682.000	3.352.537.035	100,03	11980	Keputusan	100
4129 AFA001	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	3.767.643.000	3.767.633.448	100	9	Standar	100
4129 ABG001	Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan	450.000.000	450.000.000	100	100	Rekomendasi Kebijakan	100
4129 CAB001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	150.594.000	150.592.451	100	5	Unit	100
4128 PCA001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	9.463.402.000	9.237.431.074	97,61	56254	Keputusan	100

4119	BIAO 01	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	6.273.594.000	6.277.600.972	100,06	2307	Keputusan	100
	Kode Output Strategis	Uraian RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan %	Target Keluaran	Satuan	Realisasi Vol.Keluaran
6385	BDC0 01	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	5.419.052.000	5.417.653.568	99,97	274	kegiatan	100
4119	BAH 001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	3.357.892.000	3.368.716.037	100,32	8566	Keputusan	100

A.7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, dijelaskan mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penanganan pandemic COVID-19 sebagai berikut:

1. Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan;
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun menggunakan system aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
3. Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemic COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai

- sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
4. Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa;
 5. Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan dapat menyusun laporan manajerial transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari laporan keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp43.854.522.000,00. Selama periode berjalan telah melakukan revisi sebanyak 13 kali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yang disebabkan Rfocussing, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Rincian revisi DIPA untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Revisi DIPA 1 tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp50.004.587.00,00 untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat usulan revisi anggaran no PR.03.03.41.412.01.22.58 tanggal 5 April 2022
- Revisi DIPA 2 tanggal 7 April 2022 senilai Rp50.004.587.00,00 untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat usulan revisi anggaran no PR.03.03.41.412.04.22.716 tanggal 5 April 2022
- Revisi DIPA 3 tanggal 14 April 2022 senilai Rp50.004.587.00,00 untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat usulan revisi anggaran no PR.03.03.41.412.04.22.773 tanggal 13 April 2022
- Revisi DIPA 4 tanggal 11 Mei 2022 senilai Rp50.004.587.00,00

- Revisi DIPA 5 tanggal 9 Juni 2022 senilai Rp50.004.587.00,00 dikarenakan adanya permintaan pencadangan anggaran (automatic adjustment) sesuai surat usulan Revisi Anggaran No. PR.03.03.41.412.05.22.1055 tanggal 30 Mei 2022
- Revisi DIPA 6 tanggal 6 Juli 2022 senilai Rp50.004.587.00,00 dikarenakan untuk penyesuaian rencana penarikan anggaran sesuai surat usulan Revisi Anggaran No. PR.03.03.41.412.07.22.1055 tanggal 5 Juli 2022
- Revisi DIPA 7 tanggal 21 September 2022 senilai Rp50.004.587.00,00 dikarenakan untuk penyesuaian rencana penarikan anggaran sesuai surat usulan Revisi Anggaran No. PR.03.03.41.412.09.22.1853 tanggal 20 September 2022
- Revisi DIPA 8 tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp50.004.587.00,00 dikarenakan untuk penyesuaian rencana penarikan anggaran sesuai surat usulan Revisi Anggaran No. PR.03.03.41.412.10.22.19664 tanggal 7 Oktober 2022
- Revisi DIPA 9 tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp51.304.587.00,00 dikarenakan pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan dan revisi administrasi sesuai surat usulan Revisi Anggaran No. PR.03.03.41.412.10.22.2032 tanggal 20 Oktober 2022
- Revisi DIPA 10 tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp51.304.587.00,00 dikarenakan untuk penyesuaian rencana penarikan anggaran sesuai surat usulan Revisi Anggaran No. PR.03.03.41.412.10.22.2090 tanggal 28 Oktober 2022
- Revisi DIPA 11 tanggal 17 November 2022 senilai Rp50.704.587.00,00 dikarenakan revisi antar kegiatan

dan antar satker, revisi antar KRO dan RO serta perubahan rencana penarikan Dana Halaman III DIPA sesuai surat No. PR.03.03.41.412.11.22.2151 tanggal 8 November 2022

- Revisi DIPA 12 tanggal 4 Desember 2022 senilai Rp43.854.522.00,00 dikarenakan pergeseran dalam hal pagu anggaran berubah dan revisi administrasi sesuai surat usulan No. PR.03.03.41.412.11.22.2288 tanggal 30 November 2022
- Revisi DIPA 13 tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp43.854.522.00,00

Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	97.960.620.000	97.960.620.000
Jumlah Pendapatan	97.960.620.000	97.960.620.000
Belanja		
Belanja barang	47.791.169.000	41.698.835.000
Belanja Modal	2.213.418.000	2.155.687.000
Jumlah Belanja	50.004.587.000	43.854.522.000

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Anggaran dan Program maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Realisasi Pendapatan berdasarkan Anggaran dan Program

Kode	Program	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Pegawai (51)	063.01.DR Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00
Belanja Barang (52)		47.791.169.000,00	41.698.835.000,00
Belanja Modal (53)		2.213.418.000,00	2.155.687.000,00
Total		50.004.587.000,00	43.854.522.000,00

**Realisasi
Pendapatan**
Rp115.523.805.999,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp115.523.805.999,00 dan Rp40.175.835,00. Realisasi pendapatan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 117,93% dibandingkan tahun anggaran 2021. tingginya realisasi pendapatan dikarenakan pada tahun Anggaran 2022 realisasi pendapatan PNPB Fungsional dicatat oleh Satker Kantor Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdiri hanyalah pendapatan yang berasal dari Pendapatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Negara dan Hibah	-	-	-
1. Penerimaan Dalam Negeri	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	97.960.620.000	115.523.805.999	117,93
Jumlah	97.960.620.000	115.523.805.999	117,93

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 berupa pendapatan fungsional yang terdiri dari Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan dan pemindahtanganan BMN, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 14. Rincian Pendapatan Fungsional

No	Akun	Uraian	Estimasmi	Realisasi	Persentase
1	425321	Pendapatan jasa Pengawasan Obat dan Makanan	97.960.620.000	115.482.250.000	117,89
2	425129	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	-	47.555.999	-
Pengembalian				(6.000.000)	
Total PNPB				115.523.805.999	

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan 287,5 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan pada tahun Anggaran 2022 realisasi pendapatan PNBPFungsional dicatat oleh Satker Kantor Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berasal dari Pendapatan Fungsional sebesar 117,9 persen dari estimasi pendapatan, pengelolaan BMN yaitu berupa Pemindahtanganan BMN lainnya serta Pengembalian atas Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan. Rincian Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA. 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	47.555.999	-	-
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan makanan	115.523.805.999	40.175.835	287.5
Jumlah	115.571.361.998	40.175.835	287.5

Pendapatan pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp47.555.999,00 merupakan pendapatan penjualan lelang inventaris kantor dengan No NTPN CA28A61QUHPHGQEO tanggal 18 Oktober 2022

Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan senilai Rp115.523.805.999,00 merupakan Pendapatan Fungsional Jasa Pengawasan Obat dan Makanan.

Terdapat permohonan pengembalian pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka pengajuan sertifikasi CPKB pada Direktorat Pengawasan Kosmetik dikarenakan permintaan perusahaan berdasarkan surat permohonan dari:

1. PT Megasari Makmur mengajukan permohonan pengembalian dana Resertifikasi CPKB sesuai Nomor Surat 45/MM/R/X/2022 tanggal 5 Oktober. Pengajuan tersebut sudah dikembalikan lagi kepada pemohon sesuai dokumen NTPN No. 839F66U8EC5IO1V3 tanggal 10 Agustus 2022
2. PT. Hollywood Sisters mengajukan permohonan pengembalian dana Resertifikasi CPKB Nomor Surat HSC-030/HSC-MLG/VI/22 perihal permohonan sertifikasi CPKB. Pengajuan tersebut sudah dikembalikan lagi kepada pemohon sesuai dokumen NTPN No. 5FA8255DEMOJFGR7 tanggal 31 Mei 2022

Realisasi Belanja

Negara

Rp43.845.541.410,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp43.845.541.410,00 atau 99,98% dari anggaran belanja sebesar Rp43.854.522.000,00. Rincian Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
31 Desember 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	41.698.835.000	41.775.895.449	100,18
Belanja Modal	2.155.687.000	2.155.683.901	100,00
Total Belanja Kotor	43.854.522.000	43.931.579.350	100,18
Pengembalian		(86.037.940)	-
Jumlah	43.854.522.000	43.845.541.410	99,98

Terdapat pengembalian belanja senilai Rp86.037.940,00 yaitu berupa pengembalian belanja perjalanan biasa senilai Rp63.780.081,00 dan pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota senilai Rp22.257.859,00

Grafik 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi



Dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 27.62%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada belanja barang sebesar 29.23% dan kenaikan pada belanja modal yaitu sebesar 2.81%.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	41.775.895.449	32.837.328.539	27,22
Belanja Modal	2.155.683.901	2.096.695.013	2,81
Jumlah	43.931.579.350	34.934.023.552	25,76
Pengembalian	(86.037.940)	(576.356.663)	(85,07)
Jumlah Netto	43.845.541.410	34.357.666.889	27,62

Belanja Barang
Rp41.689.857.509,00

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp41.689.857.509,00 dan Rp32.260.971.876,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 29.23 persen dari Realisasi Belanja Barang pada 2021 karena meningkatnya belanja perjalanan dalam negeri sebesar 39,76%. Rincian

Pengembalian belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	No NTPN	Tanggal	Nilai	Keterangan
1	753CC5209MVPEDER	23 Mei 2022	209.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2	21C790JSQI3SA4PO	17 Juni 2022	1.590.236	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
3	093F245IPSDDU85M	17 Juni 2022	2.254.160	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
4	80F4C8JM919A0A5N	11 April 2022	10.856.700	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5	F93FC7N8P6MUO11U	31 Mei 2022	8.842.003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
6	0B9108JM919A33HN	22 April 2022	20.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
7	AA8311GAACMDD18V	8 November 2022	10.791.400	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
8	5B7912CNQ78NVK12	19 September 2022	4.790.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
9	193A05209MVOB55R	8 April 2022	10.693.048	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
10	A21167N8P6MSQ3FK	29 Maret 2022	3.346.038	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
11	8469A6QR9C4M2310	22 September 2022	941.070	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
12	B45650JSQI41UAER	7 Desember 2022	1.185.900	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
13	AF3835UDPHI4O02M	7 April 2022	2.999.100	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
14	775427N8P6MTHMCH	6 April 2022	401.199	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
15	216D945IPSDBU89D	7 April 2022	16.497.366	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
16	890695209MVOAJ01	6 April 2022	561.830	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
17	23E4C7N8P6MSQTQD	1 April 2022	6.479.720	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
18	002A46QR9C4GDCIR	30 Maret 2022	1.514.300	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
19	E334D395A1QUKPHI	14 Maret 2022	1.929.720	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
20	591840JSQI3U7SIH	19 Agustus 2022	135.150	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Jumlah Belanja			86.037.940	

Rincian Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 18. Perbandingan Belanja Barang
31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.123.321.027	2.322.500.953	34,48
Belanja Barang Non Operasional	5.289.692.462	4.326.630.489	22,26
Belanja Barang Konsumsi	140.524.000	187.359.900	(25,00)
Belanja Sewa	440.378.878	348.140.988	100
Belanja Jasa	8.583.635.034	8.441.073.296	100
Belanja Pemeliharaan	33.858.449	57.652.092	(41,27)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.806.244.871	17.033.612.051	39,76
Belanja Perjalanan Luar Negeri	358.240.728	120.358.770	100,00
Jumlah Belanja Kotor	41.775.895.449	32.837.328.539	27,22
Pengembalian Belanja	(86.037.940)	(576.356.663)	(85,07)
Jumlah Belanja	41.689.857.509	32.260.971.876	29,23

B.2.1.1 Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Satker Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalokasikan belanja barang sebesar Rp1.246.088.000,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.246.050.932,00 atau 100%. Rincian Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid 19 untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	1.142.147.070	1.142.116.443	100%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid - 19	900.000	900.000	100%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	103.041.000	103.034.489	100%
	Pengembalian		0	
Total		1.246.088.070	1.246.050.932	100,00%

Tabel 21. Rincian Realisasi Belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Periode 31 Desember 2022

Kode Output	Kode Komponen	Kode Sub Komponen	Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
4119 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 Pelaksanaan Sertifikasi Sarana OT dan SK	051.0G Fasilitasi UMKM dalam rangka Implementasi Pemenuhan Aspek CPOTB dan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Produk Obat Tradisional	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	660.000	660.000	100%
4119 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 Pelaksanaan Sertifikasi Ekspor Impor Produk OT dan SK	052.0B Optimalisasi Dukungan Ekspor dan Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.630.000	3.630.000	100%

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Tahun Anggaran 2022

4119 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	053.0F Biaya Penanganan Pandemi Direktorat Pengawasan OT dan SK	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	85.657.070	85.655.570	100 %
4119 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	053.0F Biaya Penanganan Pandemi Direktorat Pengawasan OT dan SK	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	27.906.000	27.905.500	100 %
Kode Output	Kode Komponen	Kode Sub Komponen	Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyelesaian (%)
4121 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik	051.0F Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi (sumber dana PNBPN)	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.848.000	1.847.671	100 %
4121 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	052.0C Penguatan Pengawasan Pemasukan Kosmetik Impor Post Border melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	165.000	165.000	100 %
4121 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	052.0D Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.035.000	5.035.000	100 %
4121 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	052.0E Dialog Interaktif Prospek Ekspor Kosmetik Tematik/Natural Cosmetics dan Dukungan Pemerintah dalam Ekspor Kosmetik	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.630.000	3.630.000	100 %
4121 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	052.0E Dialog Interaktif Prospek Ekspor Kosmetik Tematik/Natural Cosmetics dan Dukungan Pemerintah dalam Ekspor Kosmetik	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.068.000	1.067.000	100 %

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Tahun Anggaran 2022

4121 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan kosmetik	053.0A Pemenuhan Keperluan Perkantoran	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	110.796.000	104.993.539	100 %
4121 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan kosmetik	053.0K Penanganan Pandemi Covid-19 Direktorat Pengawasan Kosmetik	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	187.995.000	170.589.515	100 %
4121 BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan kosmetik	053.0K Penanganan Pandemi Covid-19 Direktorat Pengawasan Kosmetik	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	11.811.000	11.536.000	100 %
Kode Output	Kode Komponen	Kode Sub Komponen	Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyelesaian (%)
4121 BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	051.0A Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	624.000	624.000	100 %
4121 BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	051.0C Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.760.000	2.760.000	100 %
4121 BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	052.0A Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.850.000	5.850.000	100 %
4121 BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	052.0C Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4.473.000	4.469.000	100 %
4128 PCA.001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	056 Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	056.01 Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Masa Pandemic Covid 19	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	471.647.000	471.628.988	100 %
4128 PCA.001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	056 Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	056.01 Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Masa Pandemic Covid 19	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12.215.000	12.214.318	99 %

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Tahun Anggaran 2022

4129 AFA.001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055.0G Sosialisasi Regulasi di bidang Suplemen Kesehatan	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.650.000	1.650.000	100 %
4129 AFA.001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	056 Monitoring dan evaluasi kinerja standardisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	056.ZZ Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	76.642.000	73.654.622	100 %
4129 AFA.001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	056 Monitoring dan evaluasi kinerja standardisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	056.ZZ Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4.008.000	4.008.000	100 %
Kode Output	Kode Komponen	Kode Sub Komponen	Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyelesaian (%)
6385 BDC.001 Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	052 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos	052.0H Penanganan Pandemi Covid19 Di Direktorat PMPU OT, SK, Kos	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	189.245.000	185.846.488	100 %
6385 BDC.001 Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	052 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos	052.0H Penanganan Pandemi Covid19 Di Direktorat PMPU OT, SK, Kos	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	11.323.000	11.323.000	100 %
6385 BDC.002 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	051 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan SK yang sesuai standar	051.0A Pencanangan Destinasi Wisata Jamu	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	145.000	145.000	100 %
6385 BDC.002 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	051 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan SK yang sesuai standar	051.0B Pemberdayaan Orang Tua Angkat Dalam Rangka Peningkatan UMKM Obat Tradisional Berdaya Saing	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.655.000	1.654.700	100 %
6385 BDC.002 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	051 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan SK yang sesuai standar	051.0C Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMKM OT melalui Fasilitator	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.931.000	5.930.621	99 %

6385 BDC.002 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	051 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan SK yang sesuai standar	051.0C Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMKM OT melalui Fasilitator	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.710.000	3.710.000	100 %
6385 BDC.002 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	051 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan SK yang sesuai standar	051.0D Penguatan Dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.463.000	1.462.700	99 %
6385 BDC.002 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	051 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan SK yang sesuai standar	051.0D Penguatan Dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.665.000	5.665.000	100 %
Kode Output	Kode Komponen	Kode Sub Komponen	Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyelesaian (%)
6385 BDC.002 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	051 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan SK yang sesuai standar	051.0M Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik Fasilitator UMKM OT	521 241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	900.000	900.000	100 %
6385 BDC.002 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	052 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar	052.0A Sinergisme Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Bidang Kosmetik	522 192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.125.000	2.125.000	100 %
6385 BDC.002 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	052 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar	052.0B Kompetensi Tersertifikasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional dan Kosmetik	521 131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.856.000	3.856.000	100 %
Total					1.246.088.070	1.216.192.232	98 %

*Belanja Modal
Rp2.155.683.901,00*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.155.683.901,00 dan Rp2.096.695.013,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 2.81 persen dibandingkan 2021. Rincian

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.511.857.501	1.811.965.013	(16,56)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	4.800.000	100,00
Belanja Modal Lainnya	210.707.000	189.930.000	10,94
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	433.119.400	90.000.000	381,24
Jumlah Belanja Kotor	2.155.683.901	2.096.695.013	2,81
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2.155.683.901	2.096.695.013	2,81

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.511.857.501,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.511.857.501,00 dan Rp1.811.965.013,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 14 persen bila dibandingkan dengan realisasi 2021. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Alat Angkutan	0	411.000.000	-
Alat Kantor dan Rumah tangga	44.207.550	36.435.394	-
Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	76.037.901	86.068.623	-
Alat Laboratorium	4.097.000		
Komputer Unit dan Peralatan Komputer	1.387.515.050	1.229.471.375	-
Jumlah Belanja Kotor	1.511.857.501	1.762.975.392	-14%
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	1.511.857.501	1.762.975.392	-14,24

Rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa :

Tabel 23. Rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Rak Besi	5	8.724.050
Rak Kayu	10	23.425.000
Loudspeaker	1	3.735.000
Dispenser	4	8.323.500
Microwave Open	2	4.097.000
Audio Video Selector (Peralatan Studio)	3	13.187.901
Tripod Camera	2	9.000.000
Video Conference	2	30.100.000
Camera Conference	1	23.750.000
PC Workstation	8	100.000.000
Laptop	74	1.174.984.050
Tablet PC	7	52.182.000
Hard Disk	1	2.029.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	46.680.000
Komputer)	1	8.830.000
External/Portable hardisk	2	2.810.000
Jumlah Belanja	131	1.511.857.501

Belanja Modal Lainnya

Rp210.707.000,00

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp210.707.000,00 dan Rp189.930.000,00. Belanja Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp20.777.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021. Belanja Modal Lainnya berupa:

Tabel 24. Rincian Belanja Modal Lainnya

No	URAIAN	Kuantitas	Nilai
1	Aplikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (NUP. 98)	1	67.615.000
2	Aplikasi Sistem Informasi Pemohonan Kajian (SIPK) (NUP.97)	1	48.500.000
3	Subsite Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Kajian (SIPK)	1	20.000.000
4	Aplikasi Pelaporan berbasis Digital dalam Rangka KIR (NUP.99)	1	74.592.000
Jumlah Belanja		4	210.707.000

Belanja
 Penambahan Nilai
 Aset Tetap
 Lainnya dan/atau
 Aset Lainnya
 Rp433.119.400,00

B.5.3 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp433.119.400,00 dan Rp90.000.000,00. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp296.709.400,00 bila dibandingkan dengan realisasi 2021. Kenaikan ini berupa:

No	URAIAN	Kuantitas	Nilai
1	Pengembangan Aplikasi E-Reporting Efek Samping OT dan SK NUP 83	1	85.000.000
2	Pengembangan Aplikasi E-Reporting Efek Samping OT dan SK NUP 55	1	45.000.000
3	Pengembangan Subsite Dit. Pengawasan OT dan SK NUP 95	1	179.520.000
4	Pengembangan Aplikasi Tools DIP Kosmetik NUP 87	1	77.189.400
5	Aplikasi E-reporting efek samping Kosmetik (NUP. 84)	1	46.410.000
Jumlah Belanja		5	433.119.400

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan
Rp52.630.700,00

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp52.630.700,00 dan Rp10.025.000,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut :

*Tabel 25. Rincian Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 2021*

Jenis	31-Dec-22	31-Dec-21
Barang Konsumsi	52.630.700	10.025.000
Jumlah	52.630.700	10.025.000

Tidak terdapat barang usang rusak per 31 Desember 2022. Telah dilakukan Stock Opname sesuai Berita Acara Stock Opname Nomor PL.03.10.43.432.12.22.2492 tanggal 31 Desember 2022.

*Peralatan dan
Mesin*
Rp 13.943.165.425,00

C.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp13.943.165.425,00 dan Rp14.907.256.361,00. Rincian Mutasi nilai Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	14.907.256.361
Mutasi tambah:	1.540.854.511
Pembelian	1.511.857.501
Transfer Masuk	19.997.010
Reklasifikasi masuk	9.000.000
Mutasi kurang:	2.504.945.447
Reklasifikasi Keluar	9.000.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	2.495.945.447
Saldo per 31 Desember 2022	13.943.165.425
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(9.397.529.005)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	4.545.636.420

Mutasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp1.540.854.511,00 merupakan transaksi pembelian, transfer masuk, dan reklasifikasi masuk dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pembelian senilai Rp1.511.857.501,00 terdiri dari :

Tabel 27. Pembelian Peralatan dan Mesin

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Rak Besi	5	8.724.050
Rak Kayu	10	23.425.000
Loudspeaker	1	3.735.000
Dispenser	4	8.323.500
Microwave Open	2	4.097.000
Audio Video Selector (Peralatan Studio)	3	13.187.901
Tripod Camera	2	9.000.000
Video Conference	2	30.100.000
Camera Conference	1	23.750.000
PC Workstation	8	100.000.000
Laptop	74	1.174.984.050
Tablet PC	7	52.182.000
Hard Disk	1	2.029.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	46.680.000
Komputer)	1	8.830.000
External/Portable hardisk	2	2.810.000
Jumlah Belanja	131	1.511.857.501

- Transfer masuk senilai Rp19.997.010,00 merupakan transaksi transfer dari Satker Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berupa 1 unit laptop sesuai dengan BAST No PL.03.07.8.85.09.22.118 tanggal 28 September 2022
- Reklasifikasi masuk senilai Rp9.000.000,00 merupakan transaksi perubahan kodefikasi barang yang sebelumnya dicatat berupa Flexible Video Camera NUP 1 dan 2 direklasifikasi menjadi Tripod Camera NUP 4 dan 5 sesuai dengan Surat Keterangan

No. PL.03.01.43.432.08.22.1621 tanggal 31 Agustus 2022

Mutasi kurang peralatan dan mesin sebesar Rp922.526.163,00,00 merupakan transaksi reklasifikasi keluar dan penghentian asset dari penggunaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Reklasifikasi Keluar Senilai Rp9.000.000 merupakan transaksi perubahan kodefikasi barang yang sebelumnya dicatat berupa Flexible Video Camera NUP 1 dan 2 direklasifikasi menjadi Tripod Camera NUP 4 dan 5 sesuai dengan Surat Keterangan No. PL.03.01.43.432.08.22.1621 tanggal 31 Agustus 2022
- Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp913.526.163,00 merupakan penghentian asset yang telah dirubah kondisi rusak berat sesuai Surat Keterangan PL.03.09.43.432.06.22.981 tanggal 6 Juni 2022

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0,00

C.3 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp32.450.000,00 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	32.450.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	32.450.000
Penghentian Aset Dari Penggunaan	32.450.000
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Tidak terdapat mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan jaringan. Terdapat Mutasi kurang senilai Rp32.450.000,00

merupakan transaksi penghentian asset dari penggunaan berupa penghentian Jaringan kabel Local Area Network (LAN) yang telah dirubah kondisi rusak berat sesuai Surat Keterangan No PL.03.09.43.432.06.22.981 tanggal 6 Juni 2022

Aset Tetap

Lainnya

Rp302.765.200,00

C.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp302.765.200,00 dan Rp425.198.150,00. Aset tetap tersebut monografi, buku lainnya, dan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya. Mutasi transaksi aset tetap lainnya pada 31 Desember 2022. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya periode pelaporan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 31. Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	425.198.150
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	122.432.950
Penghentian Aset dari penggunaan	122.432.950
Saldo per 31 Desember 2022	302.765.200
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	302.765.200

Tidak terdapat mutase tambah Aset Tetap Lainnya. Terdapat Mutasi kurang senilai Rp122.432.950,00 merupakan transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan sesuai dengan sesuai Surat Keterangan No PL.03.09.43.432.12.22.2494 tanggal 30 Desember 2022 dan No PL.03.09.43.432.6.22.981 tanggal 6 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghentian Buku Lainnya berupa Buku panduan sampling dan pengujian sebanyak 5 buku senilai Rp700.000,00.
2. Penghentian Monografi sebanyak 73 unit senilai Rp 50.733.450,00
3. Penghentian Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya berupa Jasa Konsultasi Pembuatan CD Arsip sebanyak 1 unit senilai Rp70.999.500

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

(Rp9.390.926.255,00)

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar (Rp9.390.926.255,00) dan (Rp9.660.563.440,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	13,943,165,425	9,390,926,255	4,552,239,170
2	Aset Tetap Lainnya	302,765,200	-	302,765,200
Akumulasi Penyusutan		14,245,930,625	9,390,926,255	4,855,004,370

Aset Tak Berwujud

Rp2.181.715.400,00

C.6 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp2.181.715.400,00 dan Rp2.065.638.500,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	2,065,638,500
Mutasi tambah:	688,826,400
Pembelian	190,707,000
Pengembangan Nilai Aset	453,119,400
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	45,000,000
Mutasi kurang:	572,749,500
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	45,000,000
Penghentian dari penggunaan	527,749,500
Saldo per 31 Desember 2022	2,181,715,400
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(1,571,454,668)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	610,260,732

Terdapat Mutasi tambah aset tak berwujud senilai Rp688.826.400,00 merupakan transaksi pembelian, Pengembangan Nilai Aset, dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembelian senilai Rp190.707.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	Kuantitas	Nilai
1	Aplikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (NUP. 98)	1	67.615.000
2	Aplikasi Sistem Informasi Pemohonan Kajian (SIPK) (NUP.97)	1	48.500.000
3	Aplikasi Pelaporan berbasis Digital dalam Rangka KIR (NUP.99)	1	74.592.000
Jumlah Belanja		4	190.707.000

2. Pengembangan Nilai Aset senilai Rp453.119.400,00 merupakan transaksi pengembangan aplikasi dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	Kuantitas	Nilai
1	Pengembangan Aplikasi E-Reporting Efek Samping OT dan SK NUP 83	1	85.000.000
2	Pengembangan Aplikasi E-Reporting Efek Samping OT dan SK NUP 55	1	45.000.000
3	Pengembangan Subsite Dit. Pengawasan OT dan SK NUP 95	1	179.520.000
4	Pengembangan Aplikasi Tools DIP Kosmetik NUP 87	1	77.189.400
5	Aplikasi E-reporting efek samping Kosmetik (NUP. 84)	1	46.410.000
6	Subsite Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Kajian (SIPK)	1	20.000.000
Jumlah Belanja		5	453.119.400

3. Koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp45.000.000,00 merupakan perbaikan kesalahan pencatatan pada modul komitmen sesuai Surat Keterangan No. PL.03.10.43.432.06.22.1084 tanggal 16 Juni 2022.

Terdapat Mutasi Kurang senilai Rp527.749.500,00 merupakan transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang dan Penghentian aset dari penggunaan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Koreksi Pencatatan Nilai berkurang senilai Rp45.000.000,00 merupakan perbaikan kesalahan pencatatan pada modul komitmen sesuai Surat Keterangan No. PL.03.10.43.432.06.22.1084 tanggal 16 Juni 2022.
2. Penghentian Aset dari Penggunaan sesuai dengan Surat Keterangan No PL.03.09.43.432.6.22.981 tanggal 6 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penghentian aset dari penggunaan Aplikasi SW. Sistem Analisis Risiko Terintegrasi Nup.19 senilai Rp151.739.500,00
 - b. Aplikasi Sistem Elektronik Pelaporan Efek Samping Nup.28 senilai Rp163.900.000,00
 - c. Aplikasi Multimedia Iklan Nup.30 senilai Rp25.850.000,00
 - d. Aplikasi Sistem Monitoring Inspeksi Kosmetik Nup.33 senilai Rp97.600.000,00
 - e. Aplikasi Sistem Integrasi Webreg OT, KOS, PK Nup. 54 senilai Rp40.260.000,00
 - f. Aplikasi Survey Kepuasan Pelanggan Nup. 82 senilai Rp48.400.000,00

C.7 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain
Rp1.704.152.234,00

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp1.704.152.234,00 dan Rp0,00. Berupa barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat

dan tidak lagi digunakan dalam operasional Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan Kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Adapun mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 33. Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	3.178.577.897
Penghentian dari penggunaan	3.178.577.897
Mutasi kurang:	1.474.425.663
Pencatatan Barang yang mau dihapuskan	1.474.425.663
Saldo per 31 Desember 2022	1.704.152.234
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(1.476.064.514)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	228.087.720

Terdapat Mutasi Tambah senilai Rp3.178.577.897,00 berupa:

- a. reklasifikasi Aset ke asset lainnya senilai Rp2.650.828.397,00 sejumlah 602 unit inventaris kantor
- b. reklasifikasi Aset Tak Berwujud ke Aset lainnya senilai Rp527.749.500,00 sejumlah 6 aplikasi.

sesuai Surat Keterangan No. PL.03.10.43.432.06.22.1084 tanggal 16 Juni 2022 dan PL.03.09.43.432.12.22.2494 tanggal 30 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat Mutasi Kurang senilai Rp1.474.425.683,00 berupa

- a. Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan senilai Rp946.676.163,00 sejumlah 219 unit inventaris kantor
- b. Pencatatan Aset Tak Berwujud yang mau Dihapuskan senilai Rp527.749.500,00 sejumlah 6 aplikasi

C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing (Rp3.047.519.182,00) dan (Rp1.681.186.959,00).

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp3.047.519.182,00)*

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	2.181.715.400	(1.571.454.668)	610.260.732
Aset Lain-Lain	1.704.152.234	(1.476.064.514)	228.087.720
Jumlah	3.885.867.634	(3.047.519.182)	838.348.452

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp9.254.362.500,00*

C.8 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka Pendek Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp9.254.362.500,00 dan Rp0,00

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp9.254.362.500,00*

C.8.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp9.254.362.500,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Deputi Bidang

Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2022

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90.875.000	Jasa Sertifikasi
2	Direktorat Pengawasan Kosmetik	208.987.500	Jasa Sertifikasi
3	Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos	8.954.500.000	Jasa Registrasi, Pendaftaran, Notifikasi dan Evaluasi
Jumlah		9.254.362.500	

*Ekuitas
(Rp3.508.378.978,00)*

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar (Rp3.508.378.978,00) dan Rp6.098.817.612,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp113.641.525.000,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp113.641.525.000,00 dan Rp0,00

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pengembalian Pendapatan jasa Pengawasan Obat dan Makanan	6.000.000	0	
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	113.635.525.000	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	113.641.525.000	0	100%
Jumlah	113.641.525.000	0	100%

Terdapat perubahan tata cara penerimaan PNBPFungsional yang sebelumnya secara terpusat pada satker Sekretariat Utama. Pada tahun 2022 penerimaan PNBPFungsional dilakukan pada Satker pemberi layanan.

Beban Persediaan

Rp97.918.300,00

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp97.918.300,00 dan Rp206.113.909,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 35. Rincian Beban Persediaan

31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	97.918.300	206.113.909	-52,49
Jumlah	97.918.300	206.113.909	-52,49

D.2 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp17.437.027.401,00*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp17.437.027.401,00 dan Rp15.430.614.726,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.603.536.529	730.389.996	119,55
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	192.637.200	610.172.260	(68,43)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	28.102.155	46.023.000	(38,94)
Beban Honor Operasional Satker	75.150.000	58.650.000	28,13
Beban Barang Operasional Lainnya	81.778.700	50.505.000	61,92
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.142.116.443	826.220.697	38,23
Beban Bahan	4.468.405.326	3.563.046.429	25,41
Beban Honor Output Kegiatan	519.000.000	262.200.000	97,94
Beban Barang Non Operasional Lainnya	301.387.136	496.468.060	(39,29)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	900.000		
Beban Jasa Konsultan		99.973.500	
Beban Sewa	440.378.878	348.140.988	26,49
Beban Jasa Profesi	2.360.387.840	2.094.650.000	12,69
Beban Jasa Lainnya	6.120.212.705	5.966.620.875	2,57
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	103.034.489	277.553.921	(62,88)
Jumlah	17.437.027.401	15.430.614.726	13,00

*Beban
Pemeliharaan
Rp33.858.449,00*

D.3 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp33.858.449,00 dan Rp57.652.092,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.858.449	57.652.092	(41,27)
Jumlah	33.858.449	57.652.092	(41,27)

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp24.078.447.659,00*

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp24.078.447.659,00 dan Rp16.585.345.158,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengawasan. Rincian Beban Perjalanan Dinas periode sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	6.704.635.895	3.956.718.759	69,45
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	334.595.000	106.964.000	212,81
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.098.196.900	2.463.839.000	-14,84
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.582.779.136	9.940.241.465	46,70
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	358.240.728	117.581.934	100,00
Total Beban Perjalanan Dinas	24.078.447.659	16.585.345.158	100,00
Pengembalian	0	0	
Jumlah	24.078.447.659	16.585.345.158	45,18

Terdapat kenaikan beban Perjalanan Dinas yang dibandingkan 2021 sebesar 45,18 persen dikarenakan adanya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.500.269.075,00*

D.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.500.269.075,00 dan Rp1.959.162.536,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.074.255.044	1.648.366.453	25,84
Jumlah Penyusutan	2.074.255.044	1.648.366.453	25,84
Beban Amortisasi Software	373.017.209	309.605.333	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	52.996.822	1.190.750	4.350,71
Jumlah Amortisasi	426.014.031	310.796.083	37,07
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.500.269.075	1.959.162.536	27,62

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp24.203.999,00

D.6 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	24.203.999	-115194281	-121,01%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	47.555.999	35.555.555	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	23.352.000	150.749.836	-84,51%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4.620.280	-100,00%
Penerimaan Kembali Belanja barang TAYL	0	4.620.280	100,00%
Pendapatan Penyesuaian Nilai persediaan	0	0	0,00%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00%
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4.620.280	-100,00%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	24.203.999	-110.574.001	-121,89%

2. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp47.555.999 ,00

Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Diterima dari Entitas Lain	47.555.000	35.555.555	33,75%
Jumlah	47.555.000	35.555.555	33,75%

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari Pendapatan Pemindahtanganan BMN senilai Rp47.555.999,00, merupakan pendapatan lelang inventaris kantor sesuai NTPN No. CA28A61QUHPHGQEO tanggal 18 Oktober 2022.

3. Beban Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp23.352.000,00

Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	23.352.000	150.749.836	-84,51%
Jumlah	23.352.000	150.749.836	-84,51%

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban kerugian pelepasan aset senilai Rp23.352.000,00 hal ini terjadi akibat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp6.098.817.612,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.098.817.612,00 dan Rp4.548.131.244,00

Defisit LO

Rp69.518.208.115,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp69.518.208.115,00 dan Rp(34.349.462.422) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Nilai Koreksi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp0,00

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah

sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap*

Rp0,00

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi*

(Rp45.000.000,00)

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp45.000.000,00) dan Rp0,00. Koreksi ini dilakukan karena adanya kesalahan pencatatan yaitu pada aplikasi e-reporting efek samping obat tradisional dan suplemen Kesehatan NUP 83 dengan melakukan koreksi pencatatan pengurangan nilai yang disebabkan karena kesalahan input modul komitmen sesuai Surat Keterangan No PL.03.10.43.432.06.22.1084 tanggal 16 Juni 2022.

*Koreksi Lain-
Lain*

(Rp7.419.637.500)

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp7.419.637.500) dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Unit		Nilai
1	Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6.651.600.000,00	
2	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	138.625.000,00	
3	Direktorat Pengawasan Kosmetik	629.412.500,00	
TOTAL			7.419.637.500,00

*Transaksi Antar Entitas
(Rp71.660.767.205,00)*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp71.660.767.205,00) dan Rp35.900.346.790,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 43 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	43.845.541.410
Diterima dari Entitas Lain	(115.523.805.999)
Transfer Masuk	17.497.384
Jumlah	(71.660.767.205)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*DDEL / DKEL
Rp115.523.805.999,00*

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp115.523.805.999,00 sedangkan DKEL sebesar Rp43.845.541.410,00.

Tabel 44 Rincian Nilai Transaksi Diterima Dari Entitas Lain

No	Akun	Uraian	Realisasi
1	425321	Pendapatan jasa Pengawasan Obat dan Makanan	115.523.805.999

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

*Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
Rp17.497.384,00*

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Terdapat transfer masuk sebesar Rp19.997.010,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp2.499.626,00) sehingga nilai transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.497.384,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 44. Rincian Transfer Masuk

Jenis	Entitas Tujuan	No. BAST & Tanggal	Nilai
Peralatan dan Mesin (Laptop)	Pusdatin	PL.03.07.8.85.09.22.118 Tanggal 28 September 2022	19.997.010
Akumulasi Penyusutan			(2.499.626)
Jumlah			17.497.384

*Kenaikan/ Penurunan Entitas
(Rp9.607.196.590,00)*

E.5 Kenaikan/Penurunan Entitas

Nilai Kenaikan Entitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar (Rp9.607.196.590,00) dan Rp1.550.686.368,00

*Ekuitas Akhir
(Rp3.508.378.978,00)*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar (Rp3.508.378.978,00) dan Rp6.098.817.612,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

F.1.1 Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik no. HK.02.02.43.04.21.687 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik HK:02.02.01.21.01 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen. Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM. dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

No	Jabatan	Semula	Menjadi
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. M. Suhendri. Apt. M.Farm	Drh. Rachmi Setyorini. MKM
2	Pejabat Pembuat Komitmen I	Anita Kembaren. S.Si. Apt	Meyla Nurwitasari. ST
3	Pejabat Pembuat Komitmen II	Drs. Arustiyono. Apt. MPH	Dra. Joelianti Diastoetiningasih
4	Pejabat Pembuat Komitmen III	Meiske Lucie Tumbol. S.Si. Apt	Faried Rahendra. SP
5	Pejabat Pembuat Komitmen IV	Dra. Isnaeni. Apt (M.epid)	Dra. Isnaeni. Apt (M.epid)
6	Pejabat Pembuat Komitmen V	-	Pulan Widyanati. S.Si. Apt..M.Si
7	Pejabat Penandatanganan SPM	Wijiasih. SF. Apt.. M.Si	Aprizal. S.Kom
8	Bendahara Pengeluaran	Sarmauli	Yenny Komalasari, SE

F.1.2 Virtual Account Bendahara Pengeluaran

Laporan Keuangan Deputy II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai 1 rekening yaitu rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Mandiri Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 8100124451611002 dan berubah menjadi Rekening Virtual Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 8100124451611000